

Tinjauan Kurikulum Pendidikan Sejarah Program Pascasarjana UNS

Oleh Leo Agung S

Abstract

Higher education curriculum is a set of plans and arrangements regarding the content and study materials and lessons and ways of delivery and assessment are used to guide the teaching-learning activities in college. The curriculum is a program developed and implemented to achieve an educational goal. So the curriculum can mean a program in the form of documents and program implementation. As a curriculum document (curriculum plan) was prepared in the form of details of the course, syllabus, learning design, system evaluation of success. Moderate curriculum as an implementation program is a form of learning, which obviously made (actual curriculum).

The reason there are changes in the curriculum of internal and external factors. The steps penyusunan curriculum are the following: (1) preparation of a graduate profile, ie the expected roles and functions can be run by graduates of the future in the community, (2) determination of competency based on the profile of graduates, (3) Determination of material related to the field study science and technology courses, (4) Determination of the depth and breadth of the study (credits) are done by analyzing the relationship between competence and the required study materials, (5) Combine the various study materials into courses, (6) Develop curriculum structure by means of distributing the course of the semester, (7) Develop a Learning Plan, and simultaneously (8) selecting appropriate learning method to achieve competence.

Curriculum development has broad sense, which includes planning, implementation and evaluation. Curriculum designers can follow the advice in the Book of Common Prayer in which its adherents are required to "hold fast to what is good".

Key Words ; Curriculum, changes in the curriculum

*)Artikel

**)Pembina Utama Muda/IV-c, Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP-UNS
Surakarta

***) Makalah Disajikan dalam Lokakarya Kurikulum Program Studi Pendidikan
Sejarah Program Pascasarjana UNS, 18 Agustus 2011

Pendahuluan

1. Pendidikan dan Kondisi Global

Kehidupan di abad XXI menghendaki dilakukannya perubahan pendidikan tinggi yang bersifat mendasar. Bentuk perubahan-perubahan tersebut adalah: (a) perubahan dari pandangan kehidupan masyarakat lokal ke masyarakat dunia (global), (b) perubahan dari kohesi sosial menjadi partisipasi demokratis, (c) perubahan dari pertumbuhan ekonomi ke perkembangan kemanusiaan, dan (d) kesatuan pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi. UNESCO (1998) menjelaskan bahwa untuk melaksanakan empat perubahan besar di pendidikan tinggi tersebut, dipakai dua basis landasan, berupa : *pertama*, empat pilar pendidikan: (1) *learning to know*, (2) *learning to do* (3) *learning to live together (with others)*, dan (4) *learning to be*, dan *kedua*, belajar sepanjang hayat (*learning through out life*) (Tresno Derwaman Kunaefi, dkk., 2008) .

Perubahan-perubahan mendasar yang berlangsung di abad XXI, akan meletakkan kedudukan pendidikan tinggi sebagai: (a) lembaga pembelajaran dan sumber pengetahuan, (b) pelaku, sarana dan wahana interaksi antara pendidikan tinggi dengan pasar kerja, (c) lembaga pendidikan tinggi sebagai tempat pengembangan budaya dan pembelajaran terbuka untuk masyarakat, dan (d) pelaku, sarana dan wahana kerjasama internasional.

2. Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia

Pada dasarnya setiap satuan pendidikan memiliki sistem untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sistem pendidikan tinggi dilihat sebagai sebuah proses akan memiliki empat tahapan pokok yaitu (1) Masukan (*Input*) ; (2) Proses (*Proses*); (3) Luaran (*Out put*); dan (4) hasil ikutan (*Outcome*). Yang termasuk dalam katagori masukan antara lain dosen, dan guru. Yang masuk dalam katagori proses antara lain proses pembelajaran, proses penelitian, dan proses manajemen. Yang dikategorikan luaran adalah lulusan, hasil penelitian dan karya IPTEKS, sedang yang termasuk dalam katagori hasil ikutan (*outcome*) antara lain penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap luaran perguruan tinggi, kesinambungan, peningkatan mutu hidup masyarakat dan lingkungan.

Sistem pendidikan yang baik didukung oleh beberapa unsur yang baik pula, antara lain : (1) Organisasi yang sehat; (2) Pengelolaan yang transparan dan akuntabel; (3) Ketersediaan Rencana Pembelajaran dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja; (4) Kemampuan dan Ketrampilan sumberdaya manusia di bidang akademik dan non akademik yang handal dan profesional; (5) Ketersediaan sarana-prasarana dan fasilitas belajar yang memadai, serta lingkungan akademik yang kondusif. Dengan didukung kelima unsur tersebut, perguruan tinggi akan dapat mengembangkan iklim akademik yang sehat, serta mengarah pada ketercapaian masyarakat akademik yang profesional (Tresno Derwaman Kunaefi, dkk., 2008)

Peran Kurikulum di dalam Sistem Pendidikan Tinggi

Kurikulum memiliki makna yang beragam baik antar negara maupun antar institusi penyelenggara pendidikan. Hal ini disebabkan karena adanya interpretasi yang berbeda terhadap kurikulum, yaitu dapat dipandang sebagai suatu rencana (plan) yang dibuat oleh seseorang atau sebagai suatu kejadian atau pengaruh aktual dari suatu rangkaian peristiwa. Menurut Kepmendiknas No. 232/U/2000 didefinisikan sebagai berikut :

”Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi.”

Kurikulum adalah sebuah program yang disusun dan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Jadi kurikulum bisa diartikan sebuah program yang berupa dokumen dan pelaksanaan program. Sebagai sebuah dokumen kurikulum (*curriculum plan*) dirupakan dalam bentuk rincian matakuliah, silabus, rancangan pembelajaran, sistem evaluasi keberhasilan. Sedang kurikulum sebagai sebuah pelaksanaan program adalah bentuk pembelajaran yang nyata-nyata dilakukan (*actual curriculum*). Perubahan sebuah kurikulum sering hanya terfokus pada pengubahan dokumen saja, tetapi pelaksanaan pembelajaran, penciptaan suasana belajar, cara evaluasi/asesmen pembelajaran, sering tidak berubah. Sehingga dapat dikatakan perubahan kurikulum

hanya pada tataran konsep atau mengubah dokumen saja. Ini bisa dilihat dalam sistem pendidikan yang lama dimana kurikulum diletakan sebagai aspek input saja.

Tetapi dengan cara pandang yang lebih luas kurikulum bisa berperan sebagai : (1) Kebijakan manajemen pendidikan tinggi untuk menentukan arah pendidikannya; (2) Filosofi yang akan mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik; (3) Patron atau Pola Pembelajaran; (4) Atmosfer atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial PT dalam mencapai tujuan pembelajarannya; (5) Rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu; serta (6) Ukuran keberhasilan PT dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan uraian di atas, nampak bahwa kurikulum tidak hanya berarti sebagai suatu dokumen saja, namun mempunyai peran yang kompleks dalam proses pendidikan.

1. Alasan Perubahan Kurikulum

Konsep kurikulum yang tercantum dalam Kepmendiknas No 232/U/2000 dan No 045/U/2002 lebih banyak didorong oleh masalah- masalah global atau eksternal. Hal-hal tersebut menimbulkan keadaan seperti : (1) persaingan di dunia global, yang berakibat juga terhadap persaingan perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga perguruan tinggi dituntut untuk menghasilkan lulusan yang dapat bersaing dalam dunia global; (2) adanya perubahan orientasi pendidikan tinggi yang tidak lagi hanya menghasilkan manusia cerdas berilmu tetapi juga yang mampu menerapkan keilmuannya dalam kehidupan di masyarakatnya (kompeten dan relevan), yang lebih berbudaya; dan (3) Juga adanya perubahan kebutuhan di dunia kerja yang terwujud dalam perubahan persyaratan dalam menerima tenaga kerja, yaitu adanya persyaratan *softskills* yang dominan di samping *hardskillsnya*. Sehingga kurikulum yang dikonsepskan lebih didasarkan pada rumusan kompetensi yang harus dicapai/ dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi yang sesuai atau mendekati kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat pemangku kepentingan/ stakeholders (*competence based curriculum*).

Di samping itu perubahan ini juga didorong adanya perubahan otonomi perguruan tinggi yang dijamin dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang memberi kelonggaran terhadap perguruan tinggi untuk menentukan dan mengembangkan kurikulumnya sendiri. Peran DIKTI juga

berubah yaitu hanya memfasilitasi, memberdayakan, dan mendorong perguruan tinggi untuk mencapai tujuannya, jadi tidak lagi berperan sebagai penentu atau regulator seperti masa-masa sebelumnya. Di sini secara konseptual dipisahkan antara pengembangan kelembagaan dan pengembangan kurikulum/isi pendidikannya, sehingga perguruan tinggi lebih bisa mengembangkan dirinya sesuai dengan kemampuan dan tujuan yang ingin dicapai. Jadi sangat dimungkinkan perubahan kurikulum disebabkan juga oleh adanya perubahan rencana strategis perguruan tinggi yang termuat dalam visi dan misinya .

Perubahan yang sangat cepat di semua sektor kehidupan khususnya dunia kerja, mendorong perguruan tinggi perlu membekali lulusannya dengan kemampuan adaptasi dan kreativitas agar dapat mengikuti perubahan dan perkembangan yang cepat tersebut. Alasan inilah yang mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk melakukan perubahan paradigma dalam penyusunan kurikulumnya. Tidak hanya memfokuskan pada isi yang harus dipelajari, tetapi lebih menitik beratkan pada kemampuan apa yang harus dimiliki lulusannya sehingga dapat menghadapi kehidupan masa depan dengan lebih baik serta dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Konsep kurikulum yang didasarkan pada empat pilar pendidikan dari UNESCO seperti telah diuraikan diatas, merupakan pengubahan orientasi kurikulum secara mendasar. Yaitu dari sebelumnya yang berfokus pada isi keilmuan (IPTEKS), berubah berfokus kepada kemampuan manusia di masyarakatnya, lebih luas lagi yaitu pada kebudayaannya.

2. Bentuk Perubahan

Pembaharuan konsep kurikulum pendidikan tinggi yang dituangkan dalam Kepmendiknas No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002 , yang mengacu kepada konsep pendidikan tinggi abad XXI UNESCO (1998) , terdapat perubahan yang mendasar yaitu:

- a. **Out put** hasil pendidikan tinggi yang semula berupa kemampuan minimal penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum suatu Program Studi, diganti dengan kompetensi seseorang untuk dapat melakukan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-

tugas di bidang pekerjaan tertentu. Out put hasil pendidikan tinggi ini yang semula penilaiannya dilakukan oleh penyelenggara pendidikan tinggi sendiri, dalam konsep yang baru penilaian selain oleh perguruan tinggi juga dilakukan oleh masyarakat pemangku kepentingan.

- b. **Kurikulum program studi** yang semula disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah lewat sebuah Konsorsium (Kurikulum Nasional), diubah, yakni kurikulum inti disusun oleh perguruan tinggi bersama-sama dengan pemangku kepentingan dan kalangan profesi, dan ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
- c. Berdasarkan Kepmendikbud No. 056/U/1994 **komponen kurikulum** tersusun atas Kurikulum Nasional (Kurnas) dan Kurikulum Lokal (Kurlok) yang disusun dengan tujuan untuk menguasai isi ilmu pengetahuan dan penerapannya (*content based*), sedangkan dalam Kepmendiknas No. 232/U/2000 disebutkan bahwa kurikulum terdiri atas Kurikulum Inti dan kurikulum Institusional. Kurikulum Inti merupakan penciri dari kompetensi utama, ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan. Sedangkan Kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi (Kepmendiknas No.045/U/2002).
- d. Dalam Kepmendiknas No 232/U/2000, Kurikulum terdiri atas kelompok-kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), serta Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB). Namun, pada Kepmendiknas No.045/U/2002, pengelompokan mata kuliah tersebut diluruskan maknanya agar lebih luas dan tepat melalui pengelompokan berdasarkan elemen kompetensinya, yaitu (a) landasan kepribadian; (b) penguasaan ilmu dan keterampilan; (c) kemampuan berkarya; (d) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; (e) pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

- e. **Perubahan kurikulum juga berarti perubahan pembelajarannya**, sehingga dengan konsep di atas proses pembelajaran yang dilakukan di pendidikan tinggi tidak hanya sekedar suatu proses *transfer of knowledge*, namun benar-benar merupakan suatu proses pembekalan yang berupa *method of inquiry* seseorang yang berkompeten dalam berkarya di masyarakat. Dengan demikian secara jelas akan tampak bahwa perubahan kurikulum dari kurikulum berbasis penguasaan ilmu pengetahuan dan ketrampilan (KBI) sesuai Kepmendikbud No.056/U/1994, ke KBK menurut Kepmendiknas No. 232/U/2000, mempunyai beberapa harapan keunggulan, yaitu :

”luaran hasil pendidikan (*outcomes*) yang diharapkan sesuai dengan *societal needs, industrial/business needs, dan professional needs*; dengan pengertian bahwa *outcomes* merupakan kemampuan mengintegrasikan *intellectual skill, knowledge* dan afektif dalam sebuah perilaku secara utuh.”

3. Tahapan Penyusunan /Tinjauan Kurikulum

Langkah awal yang harus dilakukan dalam menyusun kurikulum adalah dengan melakukan analisis *SWOT* dan *Tracer Study* serta *Labor Market Signals*. Hal ini jarang dipertimbangkan apakah lulusannya nanti relevan dengan kebutuhan masyarakat pemangku kepentingan (*stakeholders*) atau tidak.

Alternatif penyusunan kurikulum yang berbasis kompetensi dapat dimulai dengan langkah-langkah berikut : (1) penyusunan profil lulusan, yaitu peran dan fungsi yang diharapkan dapat dijalankan oleh lulusan nantinya di masyarakat; (2) penetapan kompetensi lulusan berdasarkan profil lulusan yang telah diancangkan; (3) Penentuan Bahan Kajian yang terkait dengan bidang IPTEKS program studi; (4) Penetapan kedalaman dan keluasan kajian (sks) yang dilakukan dengan menganalisis hubungan antara kompetensi dan bahan kajian yang diperlukan; (5) Merangkai berbagai bahan kajian tersebut ke dalam mata kuliah; (6) Menyusun struktur kurikulum dengan cara mendistribusikan mata kuliah tersebut dalam semester; (7) Mengembangkan Rancangan Pembelajaran; dan secara simultan (8) memilih metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai kompetensinya.

Pengembangan Kurikulum Program Pasca Sarjana (S2) Pendidikan Sejarah

Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan dan kehidupan manusia, maka penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat, yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Dengan sendirinya, akan berakibat pula terhadap kegagalan proses pengembangan manusia (Akhmad Sudrajat, 2008).

1. Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum memiliki pengertian yang luas, yakni meliputi *perencanaan, penerapan dan evaluasi*. Pengembangan kurikulum menyiratkan perubahan dan perbaikan, maka perbaikan kurikulum sering memiliki arti yang sama dengan pengembangan kurikulum, walaupun dalam beberapa hal perbaikan dianggap sebagai akibat dari pengembangan. Perencanaan kurikulum merupakan fase pendahuluan dari pengembangan yakni langkah menetapkan rencana yang akan dijalankan oleh guru dan siswa. Penerapan kurikulum adalah menerjemahkan rencana dalam tindakan, dan evaluasi kurikulum adalah penilaian terhadap pelaksanaan tindakan (Oliva, 1982).

Perubahan kurikulum adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Menurut Oliva (1982) ada beberapa *oksima* (ide yang diterima atau yang diusulkan sebagai kebenaran) yakni sebagai berikut :

- a. Perubahan itu tidak dapat dihindarkan dan penting, karena melalui perubahan itulah bentuk kehidupan tumbuh dan berkembang.
- b. Sebuah kurikulum tidak hanya merefleksikan, melainkan merupakan produk dari zamannya.
- c. Perubahan kurikulum yang terdahulu mungkin lebih baru dari periode sebelumnya
- d. Pengembangan kurikulum adalah sebuah proses yang terus menerus dan tiada akhir.

- e. *Pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan sebuah proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini perancang kurikulum dihadapan dalam berbagai pilihan, antara lain (1) pilihan disiplin ilmu, (2) pilihan sudut pandang, (3) pilihan tentang penekanan, (4) pilihan metodologis, dan (5) pilihan dalam pengorganisasian. Tampaknya ada dua ciri yang diperlukan bagi seorang perancang kurikulum, yakni (1) kemampuan untuk mempengaruhi keputusan setelah dilakukan suatu pengkajian suatu masalah , dan (2) kemauan untuk membuat keputusan.*

Perancang kurikulum dapat mengikuti saran dalam *Book of Common Prayer* di mana para penganutnya diminta untuk “ berpegang erat pada apa yang baik”.

2. Landasan Pengembangan/Tinjauan Kurikulum

Dalam hal ini, Nana Syaodih Sukmadinata (1997) mengemukakan adanya empat landasan utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu: (1) filosofis; (2) psikologis; (3) sosial-budaya; dan (4) ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Prinsip Pengembangan Kurikulum

Menurut Wina Sanjaya (2010) terdapat lima prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu :

- a. *Prinsip relevansi*; secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum (tujuan, bahan, strategi, organisasi dan evaluasi). Sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi (relevansi epistemologis), tuntutan dan potensi peserta didik (relevansi psikologis) serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat (relevansi sosilogis).
- b. *Prinsip fleksibilitas*; dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luwes, lentur dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latarbelakang peserta didik.

- c. *Prinsip kontinuitas*; yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal, maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antara jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan.
- d. *Prinsip efisiensi*; yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat dan tepat sehingga hasilnya memadai.
- e. *Prinsip efektivitas*; yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas.

4. Pengembangan KTSP

Terkait dengan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, terdapat sejumlah prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. *Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.* Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan.
- b. *Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender.* Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, *muatan lokal*, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi.

- c. *Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.* Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- d. *Relevan dengan kebutuhan kehidupan.* Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.
- e. *Menyeluruh dan berkesinambungan.* Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.
- f. *Belajar sepanjang hayat.* Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal dan informal, dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.
- g. *Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.* Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Masukan untuk Perubahan Kurikulum:

- a. Sebaran Mata Kuliah mengikuti Permendiknas No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002 sehingga muncul MKK, MPB, MKB, MKP.
Mata Kuliah Landasan Penguasaan Ilmu dan Keterampilan (MKK).
Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB),
Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), dan
Mata Kuliah Matrikulasi/Pre-requisite (MKM/P), baik untuk non kependidikan maupun non sejarah
- b. Oleh karena programnya Pendidikan Sejarah, maka seyogyanya ada keseimbangan antara materi kependidikan dan kesejarahan, di samping materi umum yang menjadi landasan bagi mahasiswa Magister Pendidikan. Apalagi kalau mengingat bahwa *stakeholder* kita adalah guru dan calon dosen/dosen. *Tugas guru sebagai profesi* meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan ketrampilan-ketrampilan para peserta didik. Sebagai seorang guru/calon dosen/dosen yang profesional maka diperlukan pendidikan, keahlian dan ketrampilan yang terangkum dalam empat kompetensi, yakni *kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial* (UU No. 14 Tahun 2005). Dengan demikian jelas bahwa materi-materi yang mendukung pembelajaran sejarah sangat penting, seperti :
 - 1) Kajian Kurikulum Sejarah
 - 2) Kapita Selekta Sejarah Indonesia dan Dunia (3 Sks)
 - 3) Desain, Model dan Metode Pembelajaran Sejarah (termasuk observasi ke lapangan- sekolah menengah) (3 Sks)
 - 4) Media, Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan Sejarah
 - 5) Assesmen dan Evaluasi Pembelajaran Sejarah (baik aspek Kognitif maupun Afektif)

- c. Terkait dengan Desentralisasi dan Otonomi Daerah serta munculnya KTSP, maka Sejarah Lokal perlu dikembangkan dalam rangka memperkaya pemahaman Sejarah Nasional.
- d. Dengan demikian Struktur Kurikulum :
 - 1) Komponen Kurikulum
 - 2) Mata Kuliah Landasan Penguasaan Ilmu dan Keterampilan (MKK)
 - 3) Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
 - 4) Mata Kuliah Keahlian berkarya (MKB)
 - 5) Mata Kuliah Matrikulasi/Pre Requisite (MKM/P)
 - 6) Tesis
 - 7) Sutruktur Kurikulum, Sususan Mata kuliah dan Beban Studi

Penutup

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan, sebab dalam kurikulum bukan hanya dirumuskan tentang tujuan yang ingin dicapai sehingga memperjelas visi dan misi program studi, akan tetapi juga memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kurikulum dalam kurun waktu tertentu pasti mengalami perubahan, dan itu merupakan sesuatu yang wajar guna mengikuti perkembangan iptek dan tuntutan dunia kerja, semoga.

Bahan Acuan

- Akhmad Sudrajat. 2008. *Landasan Pengembangan Kurikulum*.
<http://ayahalby.wordpress.com/2011/02/23/dasar-pengembangan-kurikulum/>,
diunduh 10 Agustus 2011.
- Daeng Sudirwo. 2002 .Otonomi Perguruan Tinggi Hubungannya dengan Otonomi Daerah. *Manajerial*. Vol .01. No1:72-79.
- Depdiknas. 2003. *Standar Kompetensi Bahan Kajian; Pelayanan Profesional Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Puskur Balitbang.
- _____. 2003. *Kegiatan Belajar Mengajar yang Efektif; Pelayanan Profesional Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Puskur Balitbang
- _____. 2003. *Penilaian Kelas; Pelayanan Profesional Kurikulum Berbasis*

Kompetensi. Jakarta: Puskur Balitbang.

Kepmendiknas RI. Nomor 232/U/2000 tentang *Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa*

Kepmendiknas RI. Nomor 045/U/2002 tentang *Kurikulum Inti Pendidikan Pendidikan Tinggi*.

Mulyasa, E.2003. *Kurikulum Berbasis Kompetensi. Konsep; Karakteristik dan Implementasi*. Bandung : P.T. Remaja Rosdakarya.

_____. 2004. *Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi; Panduan Pembelajaran KBK*. Bandung : P.T. Remaja Rosdakarya.

_____.2006. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Suatu Panduan Praktis*. Bandung : PT. Rosda Karya.

Nana Syaodih Sukmadinata. 1997. *Pengembangan Kurikulum; Teori dan Praktek*. Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya.

Oliva, Peter F. 1982. *Developing The Curriculum*. Boston-Toronto : Little Brown and Company.

Tresno Derwaman Kunaefi, dkk. 2008. *Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi*. Jakarta : Dirjen Pendidikan Tinggi

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*.

Wina Sanjaya.2010. *Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktek Pengembangan KTSP*, Cetakan ke-3. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Tinjauan Kurikulum Program Pascasarjana Pendidikan Sejarah

**Oleh
Leo Agung S**

**Makalah
Disampaikan dalam Lokakarya Kurikulum Program Studi pendidikan Sejarah
Program Pascasarjana UNS
Kamis, 18 Agustus 2011**